



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sisingamangaraja Km. 5,5 Medan Telp. (061) 7000000 : 7007770
M E D A N

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 800/ 565 /BAPENDASU/2023

T E N T A N G

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA NOMOR : 800 /33/ BAPENDASU / 2023 TENTANG PENGANGKATAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN
DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

Menimbang

- a. bahwa Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 800/33/BAPENDASU/2023 tanggal 6 Januari 2023 Tahun Anggaran 2023.
- b. bahwa dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor. 821.23/171/2023 tanggal 20 Pebruari 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
- c. bahwa berdasarkan maksud butir a dan b perlu melakukan Perubahan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 800/33/BAPENDASU/2023 tanggal 6 Januari 2023 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 dimaksud.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang *Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang *Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*;
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang *Standart Harga Satuan Regional*;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang *Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah*;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023*.
13. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang *Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023*.
14. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/20/KPTS/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang *Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023*.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 800/33/BAPENDASU/2023 tanggal 6 Januari 2023 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun Anggaran 2023, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 01 Maret 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH



ACHMAD FADLY, S.Sos, MSP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740319 199402 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Sumatera Utara (sebagai laporan)
2. Wakil Gubernur Sumatera Utara (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (sebagai laporan)
4. Inspektur Provinsi Sumatera Utara
5. Masing-masing yang bersangkutan

PELADAT PEMBUAT KOMITMEN (PK),
TAHUN ANGGARAN 2023

LAMPIRAN III
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERKATAAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 800/305/BARENDA/SU/III/2023
TANGGAL : 01 Maret 2023

K. SE RUMAH KONSTRUKSI 2002	JABATAN PADA OPD BPPDSU (III/c)	JABATAN PENGELOLA KELUARAN PADA	PROGRAM	KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN
<p>MASRAH, CE NIP. 19790511 PENYERTA TK 1 (III/d)</p>	<p>Fungsional Umum BPPDSU (III/c)</p>	<p>JABATAN PENGELOLA KELUARAN PADA</p> <p>Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris 2. UPT. PPD Sabah 3. UPT. PPD Pangkalan Brandan 4. UPT. PPD Binjai 5. UPT. PPD Padang Sidempuan 6. UPT. PPD Natal 7. UPT. PPD Pangabungan 8. UPT. PPD Sibuhuan 9. UPT. PPD Teluk Dalam 10. UPT. PPD Gunung Sitoli 11. UPT. PPD Dolok Sanggul 	<p>Penjangkauan Pemerintahan</p> <p>Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penjangkauan Urusan Pemerintahan 6. Penyediaan Jasa Penjangkauan Urusan Pemerintahan Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penjangkauan Urusan Pemerintahan Daerah 8. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 9. Pengelolaan Pendapatan Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1. Pemindahan Tugas ASN 2. Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi 1. Penyediaan komponen instalasi listrik 2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3. Penyediaan bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 2. Pengadaan gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertanian Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota 1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 4. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 5. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 6. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),
TAHUN ANGGARAN 2023

LAMPIRAN IV
REVISI/AMALAN KEPALA BADAN PENYIAPAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 000/385/B.A/PEND/3111/2023
TANGGAL : 01 Maret 2023

IP/PANGKAT/GOL. RANG.	JABATAN PADA OPD	JABATAN PENGELOLA NEGATIF PADA	PROGRAM	KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN
DA NASUTION, S.STP, 122012061001 (C1)	Fungsional Umum BPPRODU	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada :	Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SPPD 5 Pemindahan Tugas ASN 6 Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPPD 13 Pengadaan kendaraan Dinas Operasional 14 Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya 15 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 17 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 18 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 19 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota 21 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 22 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyelidikan Kepajakan Pajak Daerah 23 Penuntutan dan Penyelesaian Kebijaksanaan Pajak Daerah 24 Pengabdian, Pembinaan, dan Pelatihan teknis Data Pajak Daerah 25 Pembinaan dan kendali Pajak Daerah 26 Pengendalian, Penindakan dan Pengawasan Pajak Daerah
FAIZAL MUDA NASUTION, S.STP, M. SI NIP. 19911212 201206 1 001			Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5 Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 9 Pengelolaan Pendapatan Daerah	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 6 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota 7 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 8 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyelidikan Kepajakan Pajak Daerah 9 Penuntutan dan Penyelesaian Kebijaksanaan Pajak Daerah 10 Pengabdian, Pembinaan, dan Pelatihan teknis Data Pajak Daerah 11 Pembinaan dan kendali Pajak Daerah 12 Pengendalian, Penindakan dan Pengawasan Pajak Daerah
RENATA (III/C)					

DANDAN KEPALA BADAN PENYIAPAN DAERAH

DAERAH

ACHMAD FADLY, S.Sos, MSP
PEMBAINA UTAMA MUDA

LAMPYAN I
 REVISI SUKATMA UTAMA
 NOMOR : 0001305/BAPENDASU/III/2023
 TANGGAL : 01 Maret 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),
 TAHUN ANGGARAN 2023

NIP/PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN PADA OPD	JABATAN PENGLIOLA KEGIATAN PADA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
AHRI LUBIS, SE 916 200212 : 005 gkat I (III/D)	Kepala UPT PPD Siboga BAPENDASU	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada : 1 UPT PPD Pandan	Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
SYAIFUL BAHRI LUBIS, SE NIP. 19120916 200212 4 005 PEKATA TK I (III/D)		2 Siboga	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2 Pelaksanaan Penastusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SPP
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Pemindahan Tugas ASN 2 Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Penyediaan Komponen Insulasi Listrik 2 Penyediaan Peralatan dan Pertengkapan Kantor 3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPPD
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	5 Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 2 Pengadaan gedung atau Bangunan Lainnya 3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perseorangan 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertoran Kendaraan 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 8 Pemeliharaan Urusan Pemerintahan Daerah 9 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	9 Pengelolaan Pendapatan Daerah	1 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 2 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 3 Penyuluhan dan Perluasan Kebijakan Pajak Daerah 4 Penelitian, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 5 Pelaporan dan Konsultasi Pajak Daerah 6 Pengendalian, Pemeliharaan dan Pengembangan Pajak Daerah

PELAKSANAAN PEMBUATAN KOMITMEN (PPK),
 TAHUN ANGGARAN 2023

LIP/PANGKAT/ GOL. RUMAH	JABATAN PADA OPD	JABATAN PENGELOLA KEGIATAN PADA	PROGRAM	KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN
L NASUTION, S.Sos 05 199103 1 006 Kat I (III/d)	Kepala UPT PPD Simalungun BAPENDASU	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada : 1 UPT. PPD Tinggi- Tinggi 2 UPT. PPD Medan Utara 3 UPT. PPD Lima Puluh 4 UPT. PPD Gunung Tua 5 UPT. PPD Penampang Siantar 6 UPT. PPD Kota Pinang 7 UPT. PPD Kabanjaha	Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 9 Pengelolaan Pendapatan Daerah	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SPPD 1 Pemindahan Tugas ASN 2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPPD 1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 2 Pengadaan gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perteman Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota 1 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 2 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 3 Penyuluhan dan Pemberitahuan Kebijakan Pajak Daerah 4 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 5 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 6 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah